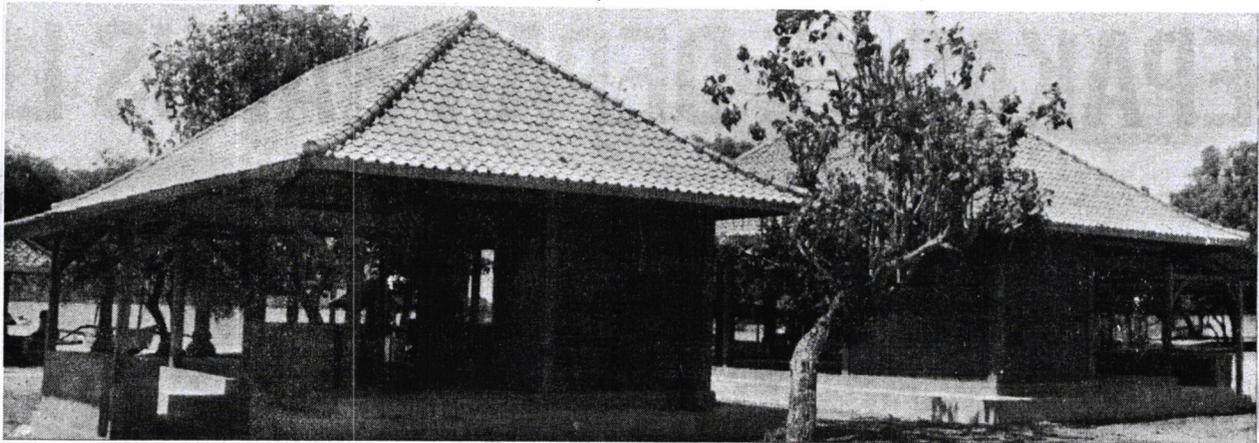




Radar Bali



DIPROTES BUPATI: Bangunan kuliner untuk makanan khas Jembrana ini seharusnya menempati lahan eks Hotel Nusantara 2, bukannya nyaplok lahan Museum Manusia Purba, Gilimanuk.

Bangunan Kuliner Serobot Lahan Museum Manusia Purba

NEGARA - Bupati Jembrana I Putu Artha marah-marah saat mengetahui ada bangunan kuliner dibangun di atas tanah milik Museum Manusia Purba di

Gilimanuk, Jembrana. Karena sesuai perintah Bupati sebelumnya, bangunan ini seharusnya didirikan di atas tanah bekas Hotel Nusantara 2 yang sebelumnya disewakan kepada pihak ketiga. Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Wisata Bahari Gilimanuk Agung Putra Alit Wirawan saat ditemui kemarin mengatakan, kasus ini sebetulnya sudah lama. Beberapa tahun lalu lanjut dia, Bupati Artha melakukan kunjungan ke Gilimanuk dan melihat tanah eks Hotel Nusantara 2 kosong. Saat itu Artha berniat mendirikan bangunan semi permanen untuk warga dan Pokmas guna menjual makanan bagi wisatawan.

Menurut pria yang akrab disapa Gung Alit ini, saat itu Artha berencana membangun beberapa blok bangunan, sehingga menampung lebih banyak masyarakat yang menjual makanan khas Gilimanuk. Seperti ayam betutu maupun ikan bakar di kawasan ini. Namun sekitar 4 bulan lalu, diinformasikan ada proyek pembangunan rumah kuliner. Sayangnya, pembangunan tidak dilakukan di tanah eks Hotel Nusantara 2, melainkan di dalam pagar kawasan Museum Manusia Purba Gilimanuk.

"Kami tidak bisa berbuat banyak karena pembangunan langsung ditangani petugas dari Bagian Pariwisata Pemkab

Jembrana. Itu sebabnya, kami tidak bisa memberikan masukan terhadap proyek bangunan kuliner tersebut," kata Gung Alit di markasnya, kemarin.

Artha yang mengetahuinya saat melepas lomba perahu layar dalam rangkaian acara HUT Kota Negara ke-120 di Gilimanuk, Artha terlihat marah. Sayangnya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisdikporaparbud) Jembrana I Nengah Alit belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi lewat telepon, ia belum bisa menjawab telepon. Demikian juga dengan Kabid Pariwisata, Nyoman Partika juga belum bisa dikonfirmasi. (don/djo)

Edisi : Selasa, 18 Agustus 2015

Hal : 47



IB Arda akan Dipanggil Lagi

Terkait Kasus PHR Badung

DENPASAR - Kasus dugaan korupsi dana PHR, masih terus dikejar oleh Kejati. Setelah Karo Keuangan Pemprov Bali yang saat ini menjadi Penjabat Bupati Karangasem IB Arda mangkir, dengan alasan acara keluar daerah. Kembali dilakukan pemanggilan, ternyata mangkir lagi. Meski begitu, Kejati kembali akan memanggil IB Arda.

"Jago mangkir Karo Keuangan Pemprov yang jadi Penjabat Bupati Karangasem itu," ujar salah satu Jaksa yang menangani. Dikonfirmasikan ke Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan membenarkan bahwa dua kali Karo

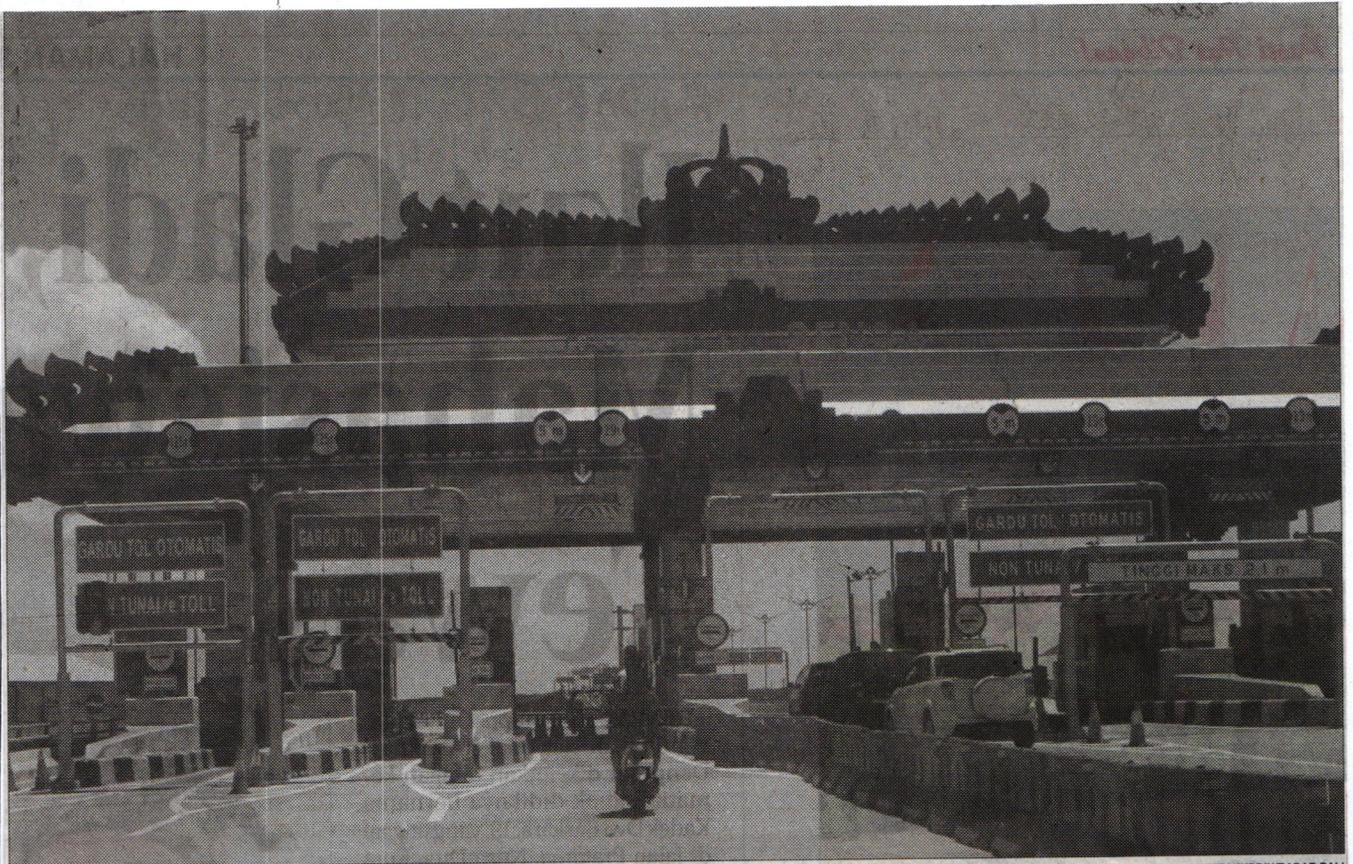
Keuangan ini mangkir. Dia mengatakan, awalnya dipanggil namun ada acara. Kemudian dipanggil lagi, tetapi alasannya ada salah komunikasi dalam pemanggilan. Maksud jaksanya beda dengan pengertian IB Arda. "Dipanggil kedua mengaku miskomunikasi, ada yang salah pengertian dalam pemanggilan antara Jaksa dan Karo Keuangan ini," ujarnya.

Atas kondisi ini, kembali akan dipanggil lagi beberapa hari lagi. "Jaksanya bilang minggu depan, saat tidak datang itu. Artinya minggu - minggu ini akan dipanggil lagi," lanjutnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, kasus ini terendus media setelah Anggota Dewan Sentana diperiksa di Kejati. Sentana membawa surat panggilan, tertanggal

30 April 2015. Surat itu bernomor PK-90/P.1.5./Fd.1/04/2015. Yang memanggil Sentana selaku Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra. Dia dipanggil untuk membawa dokumen - dokumen menyangkut penyimpanan dana PHR, termasuk PHR yang dibagikan ke enam Kabupaten di Bali. Yaitu Karangasem, Klungkung, Bangli, Tabanan, Jembrana dan Buleleng.

Dia juga mengatakan sebelumnya, sempat ramai terkait dengan selisih pertanggungjawaban nominal PHR di APBD tahun 2014. Seingat dia untuk tahun 2014 nilainya Rp 260 miliar, namun muncul selisih mencapai Rp 41 miliar. Bahkan pihak Jaksa juga akan mencari data ke DPRD Badung nantinya. (art/yes)



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

PENYESUAIAN: Aktivitas lalulintas kendaraan umum di Tol Bali Mandara diakui belum maksimal sehingga akan dilakukan penyesuaian tarif tol sekitar bulan September depan.

JBT Usul Tarif Tol Sesuai Tingkat Inflasi

NUSADUA - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang memperbolehkan dilakukannya pengajuan tarif tol baru setiap dua tahun sekali dijadikan dasar oleh PT Jasamarga Bali Tol (JBT) untuk melakukan penyesuaian tarif.

JBT mengajukan usulan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) terkait penyesuaian tarif Jalan Tol Bali Mandara. Pasalnya, berdasar rata-rata inflasi yang

terjadi di Bali selama dua tahun terakhir, JBT mengajukan peningkatan tarif tol sebesar 14,5 persen dari tarif yang telah ada. "Kami bulan September ini kan dua tahun. Kami sudah mengajukan usul pada menteri PU untuk penyesuaian tarif sesuai tingkat inflasi," ujar Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol (JBT), Akhmad Tito Karim saat ditemui setelah upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70 yang digelar Jasindo, Utama Karya dan ITDC beserta BUMN se-Provinsi Bali di Pulau Peninsula, Nusa Dua, Senin (17/8).

Menurut Tito, usulan JBT ini, saat ini telah diproses di Kementerian PU. "Yang menentukan nanti Menteri PU. Nanti mereka minta data inflasi selama dua tahun ke BPS dan dirata-ratakan. Nanti keputusan tergantung Menteri PU dan Kepala BPJT (Badan Pengaturan Jalan

Tol)," terangnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan, masih banyak utang JBT yang belum terlunasi dari proyek jalan tol ini. JBT, kata Tito, memiliki utang sebesar Rp 1,7 triliun pada bank yang dicicil pembayarannya dengan menggunakan pendapatan tol. Namun trafik kendaraan pengguna tol, kata Tito, justru belum mencapai 100 persen atau baru mencapai 90 persen dari target sebanyak 49 ribu kendaraan per harinya. "Untuk operasional sudah mencukupi, namun untuk membayar utang masih kurang," ujarnya.

Karim berharap, keputusan terkait pengajuan tarif Jalan Tol Bali Mandara ini dapat keluar pada tanggal 18 September ini, sesuai pemberlakuan tarif saat jalan tol tersebut mulai dioperasikan. (ayu/rid)

Edisi : _____
Hal : _____



Pemkab Bangli

Bersikukuh Honor Rp 2,5 Juta

ANCAMAN panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Bangli untuk mundur terkait pemberlakuan honor Rp 2,5 juta tidak mendapat tanggapan dari pihak Pemkab Bangli. Peralnya, pihak Pemkab Bangli melalui Kepala Bagian Hukum Ida Bagus Widnyana jika penetapan melalui SK Bupati terkait honor senilai Rp 2,5 juta sudah sesuai aturan berdasarkan Permenkeu no 51 tahun 2015 jika standar honor tertinggi mencapai Rp 2,5 juta.

Dirinya menjelaskan bahwa kalau merujuk NPHD baik KPU dan Panwaslih Bangli memang mengusulkan ketetapan honor untuk Kepala Panwaslih mencapai Rp 6,5 juta dan anggota mencapai Rp 5,5 juta. "Selama belum

ada perubahan pemerintah dari Permendagri, kami akan tetap menggunakan aturan itu. Kami tidak berani mengubahnya," ujarnya saat ditemui usai apel ziarah di Tugu Makam Pahlawan Pengelipuran, kemarin.

Lebih dijelaskan, jika Bupati Bangli yang saat itu I Made Gianyar sempat meminta lembaga itu untuk membuat permohonan agar bisa memberikan honor sesuai NPHD yang diajukan, namun hal tersebut masih harus melakukan kajian. "NPHD tersebut dibuat sebelum munculnya Permendagri No. 44/2015 yang diubah dengan Permendagri No. 51/2015. Jadi kami mengacu itu saja dan belum berani merubah,"

jelasnya saat menghadiri acara pertemuan dengan para veteran di Pengelipuran.

Dikonfirmasi ditempat yang sama Penjabat Bupati Bangli Dewa Mahendra Putra menyatakan masih akan melakukan konsultasi terkait permasalahan ini pada pihak Mendagri. "Kemungkinan ini terjadi karena ada perbedaan penafsiran atas aturan yang ada," tegasnya.

Sementara itu Ketua Panwaslih Kabupater Bangli I Nengah Sandiartha yang dihubungi melalui sambungan telpon masih menunggu koordinasi dari provinsi untuk menyelesaikannya. Kami masih menunggu, nantinya seperti apa aturannya," pungkasnya. (zul/pit)